

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI DI
DESA KOTA PARI, KECAMATAN PANTAI CERMIN,
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh

Junianti Lubis

NIM: 0103163040

Jurusan: Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI DI
DESA KOTA PARI, KECAMATAN PANTAI CERMIN,
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh

Junianti lubis
NIM : 0103163040

Jurusan: Pengembangan Masyarakat Islam

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Abdullah, M. Si
NIP. 196212311989031047

Pembimbing II

Dr. Salamuddin MA
NIP.197407192007011014

*deebke BT
9/10/22*

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

an, September 2020

Lampiran : 7 (Tujuh) Exp.
Hal : Skripsi
An. Junianti Lubis

Kepada Yth:
Bapak Dekan Fakultas Dakwah
dan Komunikasi UIN SU
Di-
Medan

Assalamau'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran dan masukan seperlunya untuk memperbaiki dan kesempurnaan skripsi mahasiswa An. Junianti Lubis yang berjudul; Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Ekonomi di Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Demikianlah untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Abdullah, M. Si.
NIP. 1962123118989031047

Dr. Salamuddin, MA
NIP. 197407192007011014

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Junianti Lubis

NIM : 0103163040

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Skripsi : Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Ekonomi di Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Institut batal saya terima .

Medan, 01 September 2020

Yang Membuat Pernyataan

Junianti Lubis

NIM: 0103163040

Junianti Lubis. Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Ekonomi di Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai.(2020)

Skripsi, Medan: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan, Medan, 2020.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran yang dilakukan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Desa di Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, dan untuk mengetahui program Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Desa serta untuk mengetahui faktor dan upaya yang dilakukan Pemerintah Desa.

Metode yang dilakukan adalah metode Kualitatif, dengan menggunakan Observasi, wawancara, dan Dokumentasi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Ketua PKK Desa Kota Pari.

Hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan: *pertama*, Pemerintah Desa sangat berpengaruh dalam peningkatan ekonomi di Desa Kota Pari dengan menjalankan berbagai program yang menghasilkan Dana Desa meningkat. Karena dari itu, Desa Kota pari dinobatkan sebagai salah satu Desa Maju di Sumatera Utara yang menjadi indikatornya ialah Indeks Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi, dan Ketahanan Lingkungan. *Kedua*, secara keseluruhan yang dilakukan Pemerintah Desa sudah sejalan dengan visi dan misi yaitu membangkitkan Perekonomian dengan sektor pertanian yang sudah menjadi aspek turun-temurun yang dilakukan masyarakat Desa Kota Pari. *Ketiga*, kebijakan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Desa Kota Pari dititik beratkan pada pertanian dan peternakan, karena usaha pertanian dan peternakan yang dikembangkan dapat menjanjikan meningkatnya ekonomi masyarakat.

Kata kunci: Peran Pemerintah, Ekonomi, Masyarakat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayat, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi Penelitian ini dengan baik. Penulisan Skripsi yang bersifat wajib bagi semester akhir ini dibuat berdasarkan syarat yang telah ditentukan untuk melanjutkan menuju penulisan penelitian untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara.

Penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis berterimakasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian Skripsi ini.

Dalam kesempatan kali ini peneliti berterima kasih kepada Orang tua yang telah membesarkan penulis yaitu Ayahanda Alm. H. Abdullah Lubis dan Ibunda Hj. Rubi'ah Sinambela dengan cinta dan kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan tinggi Sarjana penulis.

Dalam kesempatan kali ini, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Rektor dan Para Wakil Rektor UIN Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. Soiman, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan Para Wakil Dekan I, II, dan, III dan seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. H. Muaz Tanjung, MA selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah, M. Si. Selaku Dosen Pembimbing I yang membimbing penulis dengan penuh teliti dan semangat yang tak terbalaskan dan meluangkan waktunya ditengah pandemi Covid 19 yang mengharuskan semua berjalan dengan daring atau Online.
5. Dr. Salamuddin, MA selaku Sekertaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam sekaligus Pembimbing Skripsi II penulis, mengucapkan terima kasih karena telah berkenan membimbing penulis dan kebijaksanaanya meluangkan waktu, dan pikirannya ditengah pandemi Covid 19 yang mengharuskan semua berlaku secara daring atau Online.
6. Atikah Asnah Matondang S.Sos selaku Staf Jurusan Pengembangan Masyarakat.
7. Ucapan terima kasih juga kepada Aparatur Desa Kota Pari yang telah bersedia memberikan izin dan memberika informasi yang diperlukan oleh penulis.
8. Ucapan terima kasih kepada Abang Senior yang memberikan arahan kepada penulis yaitu Abangda Muhammad Fadhlán S.Sos. dan Ika Nur'Aini S.Sos.

9. Ucapan terima kasih kepada teman seperjuangan Geng “Squad 3003” yang saling memberi semangat dalam penulisan Skripsi dan menjadi sahabat dalam 4 tahun menjalani masa kuliah, yaitu Yulpani Aprillia Simatupang, Khairiah Syafarani, Putri Balqis Dalimunte, dan Nur Afany. Semoga semoga kita dapat lebih erat lagi dan saling tolong menolong dalam pencapaian Sarjana kita masing-masing.
10. Terimakasih kepada Yulpani Aprillia Simatupang yang menjadi sahabat saya serta teman bercerita disaat susah maupun senang, saling memberikan semangat dan saling membantu dalam pencapaian sarjana ini dan terimakasih menjadi teman satu Frekuensi, sepemikiran dan teman senasip.
11. Ucapan terimakasih kepada Arwida Suri, teman Satu kampung satu jurusan dan satu Ps yang membantu saya dalam penyelesaian skripsi dan memberikan arahan-arahan yang baik pada saya. Semoga kedepannya kita bisa berjuang bersama lagi.
12. Ucapan terimakasih kepada teman seperjuangan saya Junita Johan, Nurul Huda Siahaan, Safrina Hasibuan, Surya Bakti Panjaitan, Toha Firmansyah Saragih, dan Armayni Siregar yang menghibur saya disaat gabut dan banyak pikiran, semoga pertemanan kita tidak Putus sampai akhir hayat nanti.

13. Ucapan terima kasih kepada semua teman-teman Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) B. Terimakasih untuk kebersamaan selama lebih kurang 4 tahun ini, bersama kalian semua saya mengerti bagaimana bersikap untuk saling memahami satu sama lain, memahami bagaimana bekerjasama yang baik.
14. Ucapan terima kasih kepada teman seperjuangan KKN 100 Tanjung balai khusus nya kepada Fitri Rahayu S.Pd dan Astalia Lestari Putri Amri yang membatu penulis menyelesaikan tugas-tugas dan saling memberikan semangat kepada penulis.
15. Ucapan Terimakasih kepada Keluarga yang sebesar-besarnya telah membantu dalam hal Materi sehingga penulis dapat menyelesaikan Sarjana ini

Atas keterbatasan kemampuan penulis dalam penelitian dan penyelesaian skripsi ini, diharapkan kepada pembaca untuk memberikan kritik dan saran sehat demi kesempurnaan hasil penelitian ini. Kiranya hasil penelitian ini mudah-mudahan dapat memberi sumbangsih dalam meningkatkan kualitas pendidikan di negara ini. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Medan, 01 September 2020 M
13 Muharram 1442 H
P e n u l i s

Junianti Lubis
NIM: 0103163040

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Batasan Istilah	6
F. Sistematika Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORITIS	9
A. Peningkatan Ekonomi	9
1. Pengertian Ekonomi	9
2. Tujuan Peningkatan Ekonomi Desa Kota Pari.....	11
3. Proses Peningkatan Ekonomi Desa Kota Pari.....	13
4. Tahap Peningkatan Ekonomi Desa Kota Pari	15
B. Pemerintah Desa.....	17
C. Undang-undang Desa	19
D. Indeks Desa Membangun.....	21
E. Kerangka Berpikir.....	22
F. Penelitian Terdahulu	23
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	28
C. Sumber Data dan Informan Penelitian	30

D. Instrumen Pengumpulan Data.....	31
E. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	34
A. Gambaran Umum Desa Kota Pari.....	34
B. Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Desa.....	51
C. Pengelolaan Pendapatan Desa Kota Pari.....	57
D. Pengelolaan Belanja Desa Kota Pari.....	60
E. Indikator Kerja Pemerintah Desa Kota Pari.....	61
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	22
Tabel 2.....	34
Tabel 3.....	35
Tabel 4.....	38
Tabel 5.....	39
Tabel 6.....	40
Tabel 7.....	41
Tabel 8.....	42
Tabel 9.....	42
Tabel 10.....	43
Tabel 11.....	43
Tabel 12.....	47
Tabel 13.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan kesejahteraan masyarakat memiliki banyak ukuran dan penilaian. Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar bisa hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Upaya untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial meliputi rehabilitas sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial.

Peran lembaga dalam mendukung program sangat penting guna mencapai tujuan yang diharapkan. Lembaga adalah organisasi atau kaidah-kaidah baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan-kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu.

Peran kelembagaan sangat penting dalam mengatur sumber daya dan distribusi manfaat. Untuk itu, unsur kelembagaan perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan potensi desa guna menunjang pembangunan desa. Dengan adanya kelembagaan, petani dan ekonomi desa sangat terbantu dalam hal mengatur silang hubungan antar pemilik pemasukan dalam menghasilkan pengeluaran ekonomi desa dan dalam mengatur distribusi dari pengeluaran tersebut.

BUMDes sebagai lembaga ekonomi baru, meningkatkan ekonomi pedesaan. Hal itu diperkuat berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Lebih rinci, keberadaan BUMDes diatur dalam peraturan pemerintah (PP) No. 27/2005 tentang desa dan dirincikan melalui peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.39/2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. BUMDes merupakan wadah usaha yang memiliki semangat kemandirian, kebersamaan dan kegotong-royongan antara Pemerintah Desa dan masyarakat untuk mengembangkan aset-aset lokal guna memberikan pelayanan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa.¹

BUMDes sebagai badan Usaha Milik Desa dapat membentuk dan mengelola apasaja sesuai dengan hasil pemetaan yang dilakukan oleh masyarakat. Keunikan BUMDes terletak pada pembentukannya yaitu sesuai dengan pemetaan potensi yang dijalankan oleh masyarakat, dan bentuk berdasarkan musyawarah fungsi dan peran BUMDes adalah memberikan keuntungan, BUMDes juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga filosofi BUMDes adalah menyediakan kebutuhan masyarakat, namun tidak bertentangan dengan lingkungan masyarakat (bermitra dan bersinergi dengan baik dengan masyarakat desa secara murni).

BUMDes tidak bisa mengelak dari perkembangan zaman dan persaingan bisnis dengan pihak eksternal sehingga pengelola BUMDes dituntut untuk selalu

¹Ibrahim, *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diKawasan Tambang Emas*, (Yogyakarta:Leutika Prio, 2018), hlm. 23.

berinovasi, berkreasi dan reaktif dengan kondisi yang terjadi pada saat ini maupun dimasa yang akan datang. Diperlukan optimalisasi ekonomi sebagai pengungkit bertumbuh dan berkembangnya BUMDes yang ada di Indonesia. khususnya dengan ekonomi kreatif melalui sinergi 6 (enam) aktor ABCGFM seperti yang saat ini sedang digalakkan yaitu Akademisi, *Business/BUM DESA*, *Community*, *Finance*, *Government*, dan Media.²

Dengan adanya BUMDes pemerintah desa memiliki hak pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara mandiri, sehingga pemerintah desa bisa menentukan program yang sesuai dengan potensi desa tersebut. Oleh sebab itu pemerintah desa beserta masyarakat perlu bermusyawarah untuk memastikan keperluan jangka pendek dan jangka panjang bagi desa.

Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Peraturan Menteri Nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM) yang telah disusun didedikasikan untuk memperkuat pencapaian sasaran pembangunan prioritas sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019, yaitu mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5000 desa tertinggal, dan meningkatkan desa mandiri sedikitnya 2000 desa pada tahun 2019.

Indeks Desa Membangun mengklarifikasikan Desa dalam lima (5) status, yakni : 1. Desa Sangat Tertinggal, 2. Desa Tertinggal, 3. Desa Berkembang. 4. Desa Maju. 5. Desa Mandiri. Klasifikasi Desa tersebut untuk menunjukkan keragaman

²Andreas Syah Pahlevi, *Kolase Pemikiran Ekonomi Kreatif Nasional*, (Semarang: CV. Oxy Consultant, 2018), hlm. 22.

karakter setiap Desa dalam rentang skor 0,27-0,92. Indeks Desa Membangun. Klarifikasi dalam 5 status desa tersebut juga untuk menajamkan penetapan status perkembangan desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan. Klasifikasi status desa berdasar Indeks Desa Membangun ini juga diarahkan untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan pemajuan desa dalam mengelola dimensi ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan akan membawanya menjadi Desa Mandiri.

Sebagai upaya dalam meningkatkan status desa, Kementerian Desa melakukan berbagai kerjasama, baik dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten atau institusi pendidikan sebagai alternatif memfasilitasi desa untuk membantu penyelesaian persoalan desa dan percepatan pembangunan. Melalui Indeks Desa Membangun, diharapkan memudahkan desa dan semua komponen yang terlibat untuk mengetahui persoalan desa berdasarkan penghitung 52 indikator yang kemudian dapat di *break down* menjadi program unggulan tepat sasaran.³

Berdasarkan Latar Belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi dalam bentuk skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Di Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai”.

³Rukin, *Pembangunan Perekonomian Masyarakat Desa Mandiri*, (Sidoarjo: Zifatma Jawara, 2019), hlm. 42.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor yang Berpengaruh terhadap Peningkatan Ekonomi di Desa Kota Pari ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Ekonomi di Desa Kota Pari ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi di Desa Kota Pari.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Ekonomi di Desa Kota Pari.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah

1. Secara akademis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan Ilmu Pemberdayaan, khususnya terkait dengan Pemerintahan Desa.
2. Secara praktis penelitian ini mampu memberikan masukan yang bermanfaat bagi Pemerintahan Desa Kota Pari sebagai penyelenggara Pemerintah Desa dan menjadi alternatif strategi serta pedoman bagi Pemerintah Desa lain dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa dan peningkatan ekonomi desa.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pada judul penelitian, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan maksud dari judul penelitian “ Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Ekonomi di Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai”. Penelitian ini mengkaji lebih dalam tentang peran pemerintah desa yaitu meningkatkan Ekonomi Desa. Dengan memberikan penjelasan sekaligus pembatasan istilah untuk masing-masing variabel tersebut ialah sebagai berikut:

1. Peran

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seseorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/unjuk peran.⁴

Dari paparan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Perilaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, Oleh karena itu seorang aktor

⁴Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), Hlm. 3.

berusaha untuk selalu nampak atau dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai tidak menyimpang dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.⁵

2. Pemerintah

Pemerintah dalam artian luas meliputi badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, termasuk semua badan kenegaraan yang menyelenggarakan kesejahteraan umum. Pengertian demikian dalam masyarakat disebut dengan penyelenggara negara.

Pemerintah dalam arti gabungan badan kenegaraan tertinggi atau suatu badan kenegaraan tertinggi yang memerintah di wilayah suatu negara, misalnya Raja, Sultan, Presiden, atau Yang Dipertuan Agung (Malaysia).⁶

3. Desa

Desa adalah suatu hasil perpaduan antar kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil perpaduan tersebut ialah wujud atau ketampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang saling berinteraksi diantara unsur tersebut, serta hubungannya dengan daerah-daerah lain.

4. Ekonomi masyarakat

Salah satu konsep yang memberikan peningkatan ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan yaitu pembangunan berkelanjutan. Hal ini menjalin hubungan antara pembangunan ekonomi, kualitas lingkungan, dan keadilan sosial.

⁵ Sarlito wawan sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). Hlm.215.

⁶ Boli Sabon, *Ilmu Negara: Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2019). Hlm. 54.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan peneliti ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari :

Bab I : membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : membahas tentang landasan teoritis yang terdiri dari kerangka teori, kerangka berpikir dan penelitian terdahulu.

Bab III : membahas tentang metodologi penelitian dengan sub judul yang membahas pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : membahas tentang gambaran umum Desa Kota Pari, peran pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi desa, pengelolaan pendapatan Desa Kota Pari, Pengelolaan Belanja Desa Kota Pari, Indikator kerja pemerintah Desa Kota.Pari.

Bab V : penutup, berisikan tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Peningkatan Ekonomi Desa

1. Pengertian ekonomi

Para ahli ekonomi telah memberikan defenisi Ilmu Ekonomi dengan berbagai sudut pandang yang berbeda yang masing-masing memiliki kebenaran sendiri-sendiri. Paul Anthony Samuelson telah mengumpulkan beberapa defenisi Ilmu Ekonomi, antara lain.⁷

Pertama, Ilmu Ekonomi adalah suatu studi tentang kegiatan-kegiatan yang menggunakan uang, mencakup atau melibatkan transaksi-transaksi pertukaran antarmanusia; *kedua*, Ilmu Ekonomi adalah suatu studi mengenai bagaimana orang menjatuhkan pilihan yang tepat untuk memanfaatkan sumber-sumber produksi (tanah, tenaga kerja, barang-barang modal seperti mesin-mesin dan pengetahuan teknik), yang langka dan terbatas jumlahnya untuk menghasilkan berbagai barang serta mendistribusikan masyarakat untuk dikonsumsi; *ketiga*, Ilmu Ekonomi adalah studi tentang manusia dalam kehidupan mereka sehari-hari untuk mendapat dan menikmati kehidupan; *keempat*, Ilmu Ekonomi adalah studi tentang kekayaan; *kelima*, Ilmu Ekonomi adalah studi tentang cara-cara memperbaiki masyarakat.

Pertumbuhan Ekonomi adalah kenaikan pendapatan nasional secara berarti (dengan meningkatkan pendapatan perkapita) dalam suatu periode *output*

⁷Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Negara*, (Jakarta: KENCANA, 2012), hlm. 2

(pendapatan nasional) yang disebabkan oleh pertumbuhan alami dari tingkat pertumbuhan penduduk dan tingkat tabungan. Sedangkan menurut beberapa pakar ekonomi pembangunan, Pertumbuhan Ekonomi adalah merupakan istilah bagi negara yang telah maju untuk menyambut keberhasilan pembangunannya, secara itu untuk negara yang sedang berkembang digunakan istilah pembangunan ekonomi.⁸

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi yang semua cabang-cabang kembali kepadanya. Hal itu karena masalah-masalah ekonomi kembali kepada dua prinsip: *pertama*, Kecerdasan di dalam mencari harta, *Kedua*, Kecerdasan di dalam membelanjakan pada tempat-tempatnya. Allah Berfirman dalam Al-Qur'an surah Al- Jumu'ah /62: 10 yaitu,

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “ *Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak- banyak supaya kamu beruntung*”. (Q.S. Al- Jumu'ah/62: 10)

Jika kalian menyelesaikan shalat jum'at maka menyebarlah kalian di muka bumi untuk mencari rezeki yang halal dan untuk menuntaskan keperluan-keperluan kalian. Carilah karunia Allah dengan kerja yang halal dan keuntungan yang halal. Dan ingatlah kepada Allah saat kalian mencari rezeki yang halal itu dengan zikir yang banyak dan jangan sampai mencari rezeki itu menjadikan kalian lupa terhadap zikir

⁸Iskandar Putang, *Pengantar Ekonomi Makro: Pengantar Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Makro*, (Bogor: Mitra Wacana Media, 2015), hm. 142

kepada Allah, agar kalian mendapatkan kemenangan dengan apa yang kalian inginkan dan selamat dari apa yang kalian hindari.

2. Tujuan Peningkatan Ekonomi Desa

Pembangunan desa dapat ditingkatkan melalui pembangunan potensi perekonomian desa untuk menjadi wadah bersama masyarakat pedesaan dalam membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu sarana penyaluran inisiatif masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam desa, mengoptimalkan sumber daya manusia dalam pengelolaannya. Selain itu, posisi penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dan BUMDes juga merupakan aspek penting lainnya.⁹

BUMDes yang terkesan bagus bisa menjadi proses kehidupan masyarakat desa karena dibangun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mampu menyerap kapasitas produksi masyarakat dan aksesnya terbuka untuk semua masyarakat desa dari berbagai kalangan. Terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dapat dikatakan bahwa besar harapan untuk menuju kehidupan desa yang otonom dalam mengelola pemerintahan dan masyarakat. Adapun manfaat BUMdes yaitu sebagai komersil, pelayanan publik, ekonomi, manfaat politik, dan sosial budaya.

⁹Abdul Rahman Sulaiman, dkk, *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm, 38.

Manfaat komersil, BUMDes sebagai lembaga yang dapat meningkatkan penghasilan masyarakat sekaligus membuka ruang lebih luas bagi terbentuknya lapangan kerja untuk masyarakat desa. Potensi yang dimiliki penduduk desa dapat disalurkan guna untuk mengurangi laju urbanisasi. Manfaat pelayanan publik, selain menghasilkan keuntungan melalui bidang bisnis sebagai tujuan utama badan usaha, BUMDes harus memperhatikan kepentingan sosial masyarakat desa.

Adapun keuntungan yang diperoleh BUMDes, digunakan secara optimal bagi pembangunan pedesaan. Manfaat politik, melalui musyawarah mufakat BUMDes didirikan, direncanakan bentuk usahanya, kepengurusan, rencana kerja, operasional usaha hingga evaluasi kinerja BUMDes.¹⁰

Sesuai dengan pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa, tujuan pendirian Bumdes adalah:

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi desa
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa atau pihak ketiga
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- f. Membuka lapangan kerja

¹⁰ *Ibid, hlm, 39.*

- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
- h. Peningkatan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa (PADes)

Perencanaan pembangunan pedesaan telah dirancang dalam RPJPN 2005-2025 memiliki arah untuk perwujudan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Pembangunan wilayah pedesaan harus dapat menciptakan strategi pengembangan yang disesuaikan dengan kondisi pedesaan dengan kemampuan wilayah pedesaan pada pelayanan infrastruktur, sosial, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, sehingga dapat mewujudkan ekonomi pedesaan dan menciptakan nilai tambah yang dinikmati oleh pelaku pertanian lokal. Adapun tujuan pengembangan wilayah yang senantiasa mengarah pada tujuan pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan.¹¹

3. Proses Peningkatan Ekonomi Desa

Pandangan baru pembangunan ekonomi pada dekade 1950-1960 banyak diantara negara-negara dunia ketiga berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun gagal memperbaiki kehidupan sebagian besar penduduknya, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam defenisi pembangunan yang selama itu. Semakin lama, semakin banyak ekonom dan perumus kebijakan yang meragukan ketepatan dan kemampuan tolak ukur GNP sebagai tolak ukur atas terciptanya kemakmuran dan kriteria kinerja pembangunan. Mereka mulai mempertimbangkan dan mengubah strategi untuk mengatasi secara langsung berbagai masalah mendesak yang terjadi seperti tingkat kemiskinan yang semakin

¹¹Maryunani, *Ekonomi Pedesaan*, (Malang: UB Press, 2020), hlm. 117.

parah, pendapatan semakin anjlok, dan tingkat pengangguran semakin meningkat. Dengan demikian muncullah pandangan baru bahwa tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan bukan lagi menciptakan pertumbuhan GNP yang tinggi, melainkan penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan dari pada pendapatan, dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang.

Tiga tujuan inti pembangunan ini merupakan sebuah kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekuat mungkin melalui rangkaian kombinasi praktek sosial, ekonomi dan institusional demi mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Adapun komponen spesifikasi atas kehidupan yang lebih baik lagi yaitu kecukupan, jati diri dan kebebasan dalam memilih.¹²

Adapun proses pembangunan di semua masyarakat paling tidak harus memiliki tiga tujuan ini yaitu:

- a. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan.
- b. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi meliputi penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang

¹²Bintari Wardianto, *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2016), hlm. 346.

kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materi, melainkan juga menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan.

- c. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu bangsa serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara-negara bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

4. Tahap Peningkatan Ekonomi Desa

Peran kelembagaan sangat penting dalam mengatur sumber daya dan distribusi manfaat. Untuk itu, unsur kelembagaan perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan potensi desa guna menunjang pembangunan desa. Dengan adanya kelembagaan, petani dan ekonomi desa sangat terbantu dalam hal mengatur silang hubungan antar pemilik pemasukan maupun pengeluaran ekonomi desa dan dalam mengatur distribusi dari pengeluaran tersebut.¹³

BUMDes sebagai lambaga ekonomi baru, meningkatkan ekonomi pedesaan. Hal itu dapat dilihat berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Kelembagaan BUMDes dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat perdesaan sangat diperlukan. Keterkaitan antara pertumbuhan penduduk dan

¹³Ibrahim, *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kawasan Tambang*, (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2018). Hlm. 24

pertumbuhan ekonomi yaitu ekonomi hanya tumbuh dalam jangka panjang jika pertumbuhan penduduk lebih rendah dari pertumbuhan pangan atau produksi. Pertumbuhan penduduk hanya mengikuti deret ukur sementara pertumbuhan pangan atau produksi hanya mengikuti deret hitung akan menyebabkan tingkat perekonomian generasi mendatang cenderung buruk.

Suatu negara akan mengalami tahapan-tahapan tertentu dalam proses pembangunannya. Menurut para ahli, negara-negara sedang berkembang yang ingin maju harus melalui tahap-tahap pembangunan sebagai berikut:¹⁴

- a. Tahap Tradisional yaitu perekonomian dalam sektor pertanian di pedesaan dan struktur pemerintah yang bersifat kaku.
- b. Tahap Transisi atau persiapan untuk tinggal landas yaitu peralihan dari struktur tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dan struktur sosial yang semakin membaik.
- c. Tahap tinggal landas yaitu berbagai hambatan dalam struktur sosial dan politik dapat diatasi.
- d. Tahap menuju kematangan yaitu serikat dagang dan gerakan buruh semakin maju dan berperan serta pendapatan perkapita masyarakat harus meningkat.
- e. Tahap komunikasi massa tinggi yaitu tenaga kerja yang terdidik dan penduduk dipertanian besar dari penduduk pedesaan, alokasi sumber daya

¹⁴Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Jakarta: PI Setia Purna Invers, 2001). Hlm.

digunakan untuk kesejahteraan serta laju pertumbuhan penduduk sangat rendah.

B. Pemerintah Desa

1. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yaitu kepala desa dan perangkat desa. Pemerintahan desa juga merupakan unit dari lembaga pemerintahan yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga kini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik.

Pemerintah desa ialah subsistem penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.¹⁵

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 26 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya, mempunyai kewenangan sebagai berikut: memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, merupakan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban

¹⁵Adam Latif, dkk, *Kepemimpinan Pemerintahan Desa, Partisipatif Masyarakat dan Perencanaan Pembangunan*, (Pasuran, Jawa Timur: CV.PENERBIT QIARA MEDIA, 2019). Hlm. 35.

masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa, memanfaatkan teknologi tepat guna, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah merupakan kegiatan di mana didalamnya terdapat proses terus-menerus tentang perlindungan dan penjamin kesejahteraan masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan baik primer, sekunder, dan tersier yang kesemuanya dijamin melalui mekanisme yang telah diatur oleh konsensus bersama bernama dasar negara dan undang-undang. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman,

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ

Artinya: *“Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas dimuka bumi itu, hendak menjadikan mereka pemimpin, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi)”*. (Q.S Al- Qasas: 5)

Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa Dia akan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Bani Israil yang tertindas dan lemah itu dengan memberikan

kepada mereka kekuatan dan kekuasaan duniawi dan agama. Maka berkat perjuangan Bani Israil, berdirilah suatu kerajaan yang besar dan kuat di negeri Syam dan akhirnya mereka mempunyai kekuasaan yang besar di Mesir yang dahulunya pernah menindas dan memperbudak mereka.

C. Undang- Undang Desa

Undang- undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Pasal 1 dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- d. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

- e. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- f. Badan Usaha Milik Desa, yang disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- g. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- h. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- i. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- j. Keuangan Desa adalah segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.¹⁶

¹⁶<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/6TAHUN2014UU.HTM> diakses Tanggal 12 Maret Pukul 07: 25 WIB.

D. Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun mengklarifikasi Desa dalam lima status yaitu, Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju, dan Desa Mandiri.

Konsep pembangunan desa di Indonesia dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional periode 2005-2025. Pola pikir Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 dimulai dari kondisi umum dan tantangan.

Berkaitan dengan ketinggalan Pedesaan, dokumen RPJP Nasional 2005-2025 memandang kondisi umum pedesaan memperhatikan. Dalam bidang sosial, budaya dan kehidupan beragama, dapat dirujuk munculnya disparitas taraf pendidikan antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Dalam bidang ekonomi, disoroti tingginya kemiskinan di pedesaan. Adapun dalam bidang sarana dan prasarana diketahui rendahnya kualitas permukiman, terutama ditunjukkan oleh rendahnya infrastruktur air minum dan persampahan.¹⁷

Sementara itu, kemampuan desa berkembang mengelola daya, terutama terkait dengan potensi, informasi/nilai, inovasi/prakarsa, dan kewirausahaan akan mendukung gerak kemajuan Desa Tertinggal hingga Desa Berkembang. Klarifikasi status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun ini juga diarahkan untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan serta kemampuan mengelola daya dalam

¹⁷Ivanicuch, *Indeks Kemandirian Desa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 5.

peningkatan ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan akan membawa menjadikan desa mandiri.

Tabel 1. Klasifikasi Desa Berdasarkan Skor IDM

NO	Status Desa	Nilai Batas
1	Sangat tertinggal	$\leq 0,491$
2	Tertinggal	$>0,491 \leq 0,599$
3	Berkembang	$>0,599 \leq 0,707$
4	Maju	$0,707 \text{ dan } \leq 0,815$
5	Mandiri	$>0,815$

Tabel diatas menjelaskan bahwa klasifikasi Desa sudah ditetapkan dalam lima sektor Indeks Desa Membangun.

E. Kerangka Berpikir

Berdasarkan Indeks Desa Membangun, ada tiga dimensi yang menjadi dasar penilaian status desa, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, indeks ketahanan ekonomi, indeks ketahanan lingkungan. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa.

Paradigma pembangunan yang mengedepankan pembangunan manusia didasarkan pada ruang dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi, dalam rangka membangun kemandirian desa yang berkelanjutan.

Model Pemerintahan saat ini yang mana setiap daerah mempunyai otonomi daerah sendiri dalam pemerintahan dan dalam memanfaatkan dan mengelola potensi yang dimiliki oleh daerahnya sendiri baik dalam Sumber Daya Alam (SDA), maupun Sumber Daya Manusia (SDM).

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Hendarji Putra Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang berjudul Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Status Desa Menuju Desa Mandiri (Studi Desa Danura kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran).

Dengan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa strategi yang dijalankan oleh pemerintah Desa Danura adalah sebagai berikut:

a. Strategi Organisasi

Pemerintah Desa Hanura menggunakan strategi organisasi dalam hal perumusan visi dan misi, sasaran strategi berdasarkan isi strategi dan potensi yang ada pada desa. Visi Desa Hanura untuk meningkatkan status desa adalah “Terwujudnya Desa Hanura Mandiri, Cerdas, Berbudaya, Berteknologi dan Sejahtera”. Visi tersebut dijabarkan dengan beberapa misi: peningkatan pelayanan, peningkatan sumber daya manusia, pembangunan ekonomi serta pembangunan infrastruktur.

b. Strategi Program

Strategi program yang dilakukan pemerintah Desa Hanura sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang di prioritaskan. Fokus dan strategi program yang dilakukan adalah untuk mengatasi permasalahan sosial yang di implementasikan dalam bentuk program. Pemerintah desa melaksanakan strategi program berdasarkan visi dan misi serta permasalahan yang ada di masyarakat yaitu pembangunan fisik, seperti peningkatan kualitas pemukiman, pembangunan infrastruktur dan fasilitas desa dan non fisik seperti pelatihan ekonomi masyarakat dan pengembangan zona ekonomi khusus, aktivasi BUMDes sebagai sarana pemasaran produk desa serta peningkatan fungsi kelembagaan desa. Beberapa program yang tepat untuk dijalankan sebagai bentuk konkrit pengentasan masalah dalam Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Lingkungan.

c. Strategi Pendukung Sumber Daya

Strategi kelembagaan diarahkan pada peningkatan kemampuan mengelola organisasi dan melaksanakan program melalui peningkatan kemampuan aparatur kelembagaan desa berupa kemampuan mengoperasikan teknologi, pelatihan pembuatan peraturan desa, dan peningkatan kemampuan pelayanan publik. Strategi kelembagaan yang dijalankan Pemerintah Desa.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu bentuk peningkatan ekonomi dan menyejahterakan masyarakat melalui program-program yang dilakukan oleh

Pemerintah Desa sehingga menjadikan pendapatan desa menjadi meningkat dan kesejahteraan yang didapatkan di masyarakat. Perbedaan penelitian ini yaitu Desa Hanura mendapat Predikat Desa Mandiri sementara Desa Kota Pari mendapat Predikat Desa Maju.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rian Kandra Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uinsu yang berjudul Pemberdayaan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Sukaribun Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara.

Dengan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa pemberdayaan pemerintah desa yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Sukaribun yaitu:

- a. Pemberdayaan Pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat tentang Pemberdayaan Pemerintah Desa yaitu: program yang diimplementasikan terhadap petani di Desa Sukaribun adalah penanaman modal dan pelatihan pertanian. Modal yang merupakan uang yang diberikan Pemerintah untuk petani dengan harapan hasil panen yang banyak dan berkembang agar dapat meningkatkan petani dengan hasil panen yang melimpah sehingga taraf hidup dapat terbedayakan. Pemberdayaan petani serai wangi yang dimulai sejak tahun 2018.
- b. Peraturan pemerintah terhadap larangan perluasan lahan perkebunan salah satu yang menghambat petani yang diberdayakan karena lahan yang sudah ditanami pohon coklat, jagung dan lainnya. Sehingga masyarakat lain yang ingin diberdayakan Pemerintah tidak memiliki lahan maka tidak

akan diberikan modal oleh pemerintah. Dana yang dimiliki Pemerintah tergolong sedikit hanya bisa memberdayakan 10 sampai 15 keluarga saja.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ita Ulumiyah, Abdul Juli Gani dan Indah Mindarti Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang. yang berjudul Peran Pemerintah dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang).

Dengan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa Peran Pemerintah yang dilakukan oleh Pemerinah Desa Sumberpasir yaitu:

- a. Pemerintah Desa Sumberpasir telah menjalankan perannya dengan baik, yang dibuktikan dengan masuknya desa Sumberpasir dalam seleksi desa mandiri pada tahun 2011. Hal yang dilalui yaitu program-program yang menghasilkan penetapan yaitu pengaktifan pengelola keuangan amanah, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, peningkatan ekonomi produktif, sebagai pelaksana kebijakan, dan pembina kehidupan masyarakat yang mencakup bidang ekonomi, pelayanan kesehatan, keagamaan, pendidikan dan kepemudaan.
- b. Pemerintah Desa Sumberpasir mempunyai kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat serta mempunyai anggaran dana yang baik dan mendukung kelancaran pembangunan yang ada di Desa Sumberpasir. Sedangkan dalam faktor penghambat yang

dihadapi oleh Pemerintah Desa Sumberpasir yaitu partisipasi masyarakat, budaya malas yang ada dalam diri masyarakat desa serta kurangnya fasilitas dalam menunjang kelancaran kegiatan yang ada di desa ini menyebabkan program-program pemberdayaan menjadi terhambat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif.¹⁸ Digunakan metode penelitian yang demikian karena kajian penelitian yang diteliti adalah untuk menemukan pemahaman secara mendalam yakni Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Ekonomi di Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai.

Selain itu penelitian ini juga disebut penelitian kualitatif jenis deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya saat penelitian berlangsung.

Ada beberapa alasan penggunaan metode penelitian deskriptif. Pertama penelitian ini memiliki tujuan untuk “mengambil sebuah gambar” dan mendeskripsikan gambar tersebut seperti layaknya sebuah kamera, dimana peneliti memotret kejadian yang ada di sekelilingnya dan mendeskripsikan apa yang dapat dilihat pada gambar yang berhasil dipotret. Umumnya, pada penelitian deskriptif

¹⁸Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 8.

membutuhkan data yang banyak, namun peneliti hanya mendeskripsikan atau menginterpretasikan data tersebut berdasarkan apa yang tampak tanpa penelusuran mendalam.¹⁹

Alasan kedua dikarenakan pada penelitian bersifat sosial dan dinamis. Fakta, hambatan, kendala serta hasil penelitian ini nantinya akan lebih mudan di analisis dengan melakukan penggambaran secara mendalam untuk memudahkan mendapatkan kesimpulan yang menjawab persoalan tentang strategi meningkatkan status desa.

Tujuan penelitian Deskriptif, adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Di samping itu penelitian ini juga menggunakan teori-teori, data-data dan konsep-konsep sebagai kerangka acuan untuk menjalankan hasil penelitian, menganalisis dan sekaligus menjawab persoalan yang diteliti.

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan data yang diuraikan pada Indeks Desa Membangun bahwa Desa Kota Pari mendapatkan predikat Desa Maju. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan di Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai.

¹⁹Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 53.

C. Sumber Data dan Informan Penelitian

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan.

Sehingga, Observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data Primer dan Skunder yaitu Kepala Desa Kota Pari dan Staff Pemerintah Desa Kota Pari.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan struktur dan historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain. Sumber data sekunder bisa diperoleh dari dalam suatu perusahaan (sumber internal), berbagai Internet Websites, perpustakaan umum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian ini.²⁰

Adapun data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu sumber dari Kepala Desa Kota Pari Bapak Abdul Khair dan Bapak Hambali selaku Sekretaris Desa Kota Pari.

²⁰Asep Hermawan,., *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hlm. 168.

Informan penelitian dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperoleh. Dalam penelitian ini terdapat beberapa informan yaitu:

1. Kepala Desa : Abdul Khoir
2. Sekretaris Desa : Hambali
3. Ketua BUMDes : Sumarni

D. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data sebelum data diolah melalui sebuah prosedur yang telah ditetapkan Instrumen Pengumpulan Data (IPD) yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian adalah antaranya:

1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung dilokasi penelitian untuk mendapatkan data tentang masalah yang diteliti. Observasi yang dilakukan terlebih dahulu yaitu meningkatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada tahun 2019 dengan menjalankan berbagai program yang diselenggarakan Pemerintah Desa sehingga Desa Kota Pari mendapat peringkat sebagai Desa Maju di Sumatera Utara. Observasi yang dilakukan secara tetutup langsung ke Kator Desa untuk memperoleh data yang akurat dari Perangkat Desa, yang sebelumnya sudah mendapat izin dari Kepala Desa untuk melakukan penelitian.
2. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab terhadap sumber data, bahan pembicaraan biasanya telah dirumuskan sedemikian rupa sesuai dengan pokok

pembahasannya. Salah satunya ialah sekretaris Pemerintah Desa secara tatap muka dan memberikan beberapa pertanyaan dan akhirnya mendapatkan data yang relevan.²¹

3. Dokumentasi dan Record adalah setiap bahan atau pernyataan tertulis atau film yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau akunting, yang dilakukan pada setiap momen atau hasil penelitian yang harus disimpan dalam bentuk foto maupun catatan sebagai bukti penelitian benar dilakukan dan menambahkan keakuratan data. Pengumpulan data yang relevan yang dilakukan Pemerintah Desa Kota Pari.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara mengolah data telah diperoleh dari lapangan. Hasil analisis data ini merupakan jawaban dari pertanyaan masalah.

Teknik analisis data harus disesuaikan dengan jenis penelitian. Berdasarkan hal tersebut, yakni teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data secara kuantitatif menggunakan rumus-rumus statistik dan mengolah data. Teknik analisis data kualitatif menggunakan analisis kualitatif atau nonstatistik.²²

²¹Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi 2017) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU Medan, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Medan: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2017), hlm. 33.

²²Kun maryanti dan Juju suryawati, *Sosiologi*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2001), hlm. 111.

Kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

1. Reduksi data yaitu sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan.
2. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberkemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Menarik kesimpulan verifikasi.²³

²³Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 339.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Kota Pari

Asal Nama Desa Kota Pari menurut sejarah pada pendahulu bahwa di salah satu pantai yang sekarang menjadi Pantai Gudang Garam, terkenal banyak ikan pari. Pada saat banyak- banyak nya ikan pari pantai menjadi seperti kota yang ramai. Jadi pada saat itu di sebutlah Desa Kota Pari sampai sekarang, namun nama Desa Kota Pari masih perlu penggalian tentang asal-usul bentuknya desa ini. Adapun tokoh-tokoh yang pernah memimpin Desa Kota Pari secara berurutan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Tabel Pemimpin Pemerintah Desa Kota Pari

NO	Nama	Tahun Menjabat	Keterangan
1	BAHARI	1964-1969	Kepala Desa
2	AHMAD HS	1969-1983	Kepala Desa
3	SARNO BAYU AJI	1983-1989	Kepala Desa
4	TENGGU ZUHIR	1989-1995	Kepala Desa
5	SAMUDIN	1995-1998	Kepala Desa
6	Drs. FERRY SYAHRIZA	1998-2001	Kepala Desa
7	SUPARDI	2001-2012	Kepala Desa
8	ABDUL KHAIR	2013 s/d sekarang	Kepala Desa

Tabel di atas menjelaskan tentang Pemimpin Desa dari tahun 1964 sampai dengan 2020 sekarang. Namun, yang paling lama memimpin adalah Bapak Abdul Khair.

Desa Kota Pari selalu merencanakan dan melaksanakan program-program penunjang kemasyarakatan desa, agar terwujud proses perbaikan diri dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara utuh dan mandiri. Itu semua dilakukan atas kerjasama Pemerintah Desa dengan LKMD, BPD, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat lainnya.

Dalam rangka menata kemasyarakatan di Desa Kota Pari, banyak sekali program-program yang telah dilakukan baik itu dalam bentuk peraturan desa, pembangunan sarana dan prasarana fisik maupun kegiatan penunjang lainnya. Kegiatan tersebut dilakukan secara berkesinambungan dan terencana, melalui musrembang yang sengaja diselenggarakan dalam setiap awal tahun anggaran.

Tabel 3. Sejarah proses pembangunan Desa Kota Pari

NO	Tahun	Kejadian Baik	Kejadian Buruk
1	1950-1983		Terjadinya bencana banjir yang diakibatkan meluapnya air sungai ular ke permukiman dan area persawahan warga yang disebabkan tidak adanya tanggul sungai ular
2	1983	Pembangunan tanggul Sei	

		Ular sehingga ketika musim penghujan datang air sungai	
3	1987		Terjadinya kesalahpahaman antara masyarakat dengan TNI
4	1998	Pembuatan jalan manunggal yang di laksanakan oleh ABRI masuk Desa	
5	2012	Penambahan pembuatan tanggaul Sei Ular	
6.	2006 s/d 2015	Pendirian balai seni budaya dan pementasan seni budaya setiap tahunnya.	

Tabel diatas menjelaskan tentang proses pembangunan Desa Kota Pari yang terdapat hal baik dan buruknya dari tahun 1950 sampai 2015. Namun, dari tahun 1998 sampai dengan sekarang, tidak banyak lagi kejadian buruk yang terjadi di Desa Kota Pari.

2. Visi dan Misi Desa Kota Pari

a. Visi Desa Kota Pari

Untuk mencapai sebuah desa yang baik, pemerintah Desa Kota Pari merangkul setiap lapisan masyarakat untuk bergandengan tangan membangun dan mewujudkan Desa Kota Pari yang mandiri, karna disadari untuk melakukan sebuah gerakan perubahan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan dan membutuhkan

waktu yang tidak sebentar, namun harus berkesinambungan maka dari itu Pemerintah Desa Kota Pari sadar harus memiliki visi 5 tahun kedepan untuk meningkatkan kualitas dan mutu masyarakat Desa Kota Pari Dengan visi sebagai berikut **Terwujudnya Perekonomian Masyarakat Yang Mandiri Melalui Bidang Pertanian, Pembangunan Serta Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Desa.**

Visi pembangunan Desa Kota Pari tersebut mengandung makna, bahwa kebersamaan Pemerintah Desa Kota Pari bersama masyarakat Desa Kota Pari berkeinginan lima tahun kedepan pelayanan keutuhan masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana. Pengembangan potensi Sumber Daya Manusia dengan harapan kehidupan masyarakat lebih sejahtera, lebih baik lahir batin di dalam diri seluruh masyarakat Desa Kota Pari.

Untuk mencapai keadaan yang sejahtera itu, diperlukan adanya pelayanan Pemerintah Desa yang mengutamakan kepentingan masyarakat desa dengan lebih demokratis, transparan/keterbukaan, melayani, memperbaiki dan berkepedulian kepada keseluruhan masyarakat, selain itu demi mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan, maka diperlukan adanya Sumber Daya Manusia Desa Kota Pari yang berkualitas (Sehat, Cerdas, dan Produktif).

b. Misi Desa Kota Pari

Misi Pembangunan Desa Kota Pari Tahun 2014 – 2019 :

- 1). Membangun tata pemerintah Desa Kota Pari yang lebih baik dengan bersendikan pada prinsip transparansi/ keterbukaan, bekerja sama gotong-royong, tanggung jawab, saling percaya dan partisipasi aktif masyarakat.

- 2). Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Desa Kota Pari yang berpendidikan baik, yang beriman, bertaqwa dan tanggap terhadap kemajuan zaman dengan bersandarkan nilai-nilai moral dan spritual.
- 3). Mengembangkan dan memanfaatkan Sumber Daya Alam Desa Kota Pari yang berwawasan lingkungan, terutama disektor pertanian.
- 4). Mengembangkan kapasitas partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kegiatan ekonomi produktif dan pengembangan usaha mikro kecil.
- 5). Meningkatkan kualitas kesehatan Masyarakat Desa Kota Pari yang memanfaatkan sarana kesehatan dan lingkungan yang sehat.

3. Kondisi Umum Desa Kota Pari

Desa Kota Pari terbentuk dari sebelas wilayah dusun, dimana keseluruhan luas Desa Kota Pari mencapai 1.000,5 Ha (berdasarkan Badan Pertahanan Negara) Tahun 2008. Sebagian besar lahan yang ada di Desa Kota Pari dimanfaatkan oleh Penduduk untuk kegiatan pertanian, untuk lahan sawah seluas 430 Ha, perkebunan 7,5 Ha.

Tabel 4. Peruntukan atau pemanfaatan lahan Desa Kota Pari

No	Pemanfaatan Lahan	Luas	Keterangan
1	Luas Baku tanah sawah	430 Ha	Irigasi
	Luas Baku tanah darat	81 Ha	Pemukiman
3	Irigasi Desa Non PU	800 m	-
4	Irigasi Sederhana	3.500 m	-

5	Tanah kuburan	1.600 m	Dusun I, III, V, XI
6	Tanah kebun	75 Ha	Kebun sawit milik penduduk
7	Tanah rawa	0.5 m	Dusun IV

Tabel diatas menjelaskan terdapat tujuh pemanfaatan lahan yang diperuntukkan setiap desun di Desa Kota Pari. Dari Ketujuh lahan diatas Lahan Irigasi adalah lahan yang paling luas.

4. Kondisi Geografis Desa Kota Pari

Kondisi geografis Desa Kota Pari dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Kondisi geografis Desa Kota Pari

NO	URAIAN	Keterangan
1	Luas	1,000, 5 Ha
2	Jumlah Dusun	11 (sebelas) Dusun
3	Batas wilayah <ul style="list-style-type: none"> - Utara - Selatan - Barat - Timur 	Selat Malaka Desa Celawan Sei Ular Desa Pantai Cermin Kanan
4	Topografi <ul style="list-style-type: none"> - luas kemiringan Lahan - Ketinggian diatas permukiman laut Rata-rata 	Elevasi relatif 0° 3 m DPL

5	Hidrologi - Irigasi berpengairan teknis - Irigasi berpengairan ½ teknis - Sawah tanah hujan	323 Ha 68 Ha 42 Ha
6	Klimatologi - Suhu - Curah Hujan - Kelembapan Udara	32° 1250 m – 2000 m 60% - 70%

Tabel diatas menjelaskan kondisi dan keadaan yang terjadi di Desa Kota Pari, dengan luas daerah 1.000.5 Ha dan Suhu 32°. Desa Kota Pari termasuk desa yang cukup panas.

5. Kondisi Demografi Desa Kota Pari

Jumlah penduduk Desa Kota Pari berjumlah 6220 jiwa pada tahun 2014 yang terdiri atas 3072 jiwa laki-laki dan 3148 jiwa perempuan dengan jumlah kepala Keluarga (KK) sebanyak 1542 KK.

Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk terhadap luas lahan atau luas daerah. Kepadatan penduduk dinyatakan dengan satuan “jiwa/km²” sebagai catatan 1 Km² = 100 Ha, 1 Ha = 1/100 Km².

Jika jumlah penduduk tahun 2011 diperbandingkan dengan luas lahan dapat menggambarkan kepadatan penduduk, yaitu sebesar 2.245,426 x 1 jiwa/ Km² 5,25 jiwa/Km². Angka ini menggambarkan bahwa setiap 1 Km². Angka ini

menggambarkan bahwa setiap 1 Km² lahan di Desa Kota Pari dihuni oleh 5 jiwa.

Dengan demikian, desa ini tergolong berpenduduk jarang (tidak padat).

Tabel 6: Data penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	3.072 jiwa
2	Perempuan	3.148 jiwa
3	Jumlah	6.220 jiwa

Tabel diatas menjelaskan bahwa penduduk perempuan di Desa Kota Pari lebih banyak dibanding dengan laki-laki.

Dengan Kepala Keluarga (KK) : 1.542 KK

Tabel 7: Desa Kota Pari Terdiri dari 11 (Sebelas) dusun :

NO	Dusun	Per kk	Per jiwa
1	Dusun I	125 KK	516 Jiwa
2	Dusun II	166 KK	677 Jiwa
3	Dusun III	306 KK	1.235 Jiwa
4	Dusun IV	238 KK	949 Jiwa
5	Dusun V	174 KK	739 Jiwa
6	Dusun VI	95 KK	370 Jiwa
7	Dusun VII	77 KK	380 Jiwa
8	Dusun VIII	83 KK	334 Jiwa

9	Dusun IX	101 KK	337 Jiwa
10	Dusun X	102 KK	417 Jiwa
11	Dusun XI	75 KK	266 Jiwa

Tabel diatas menjelaskan bahwa terdapat jumlah penduduk dengan 1.442 KK dan 11 Dusun dengan Jumlah KK terbanyak yaitu Dusun III dengan jumlah 306 KK dan jmlah KK yang paling sedikit yaitu Dusun XI dengan jumlah 75 KK.

Tabel 8 : Jumlah penduduk menurut agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	4.896 jiwa
2	Kristen/	12. Jiwa
3	Katholik	5 Jiwa
4	Hindu	12 Jiwa
5	Budha	1.300 Jiwa
6	Konghucu	0 Jiwa

Tabel diatas menjelaskan bahwa terdapat 5 Penganut agama dan penganut agama islam jumlah terbesar yang terdapat di Desa Kota Pari dengan jumlah 4.896 jiwa dan yang paling sedikit adalah 5 jiwa yaitu agama katholik.

Tabel 9: Jumlah penduduk menurut Suku

No	Suku	Jumlah
1	Jawa	3.092 Jiwa
2	Melayu	1.500 Jiwa
3	Banjar	241 Jiwa
4	Batak	17 Jiwa
5	Mendailing	199 jiwa
6	Banten	40 Jiwa
7	Tionghoa	1.611 Jiwa

Tabel diatas menjelaskan bahwa terdapat 7 suku yang ada di Desa Kota Pari dan yang lebih dominan adalah suku jawa dengan jumlah 3.092 jiwa dan yang paling sedikit adalah suku batak dengan jumlah 17 jiwa.

Tabel 10: Jumlah penduduk Menurut Usia

No	Usia	Jumlah
1	00-005 Tahun	: 495 Jiwa
2	06-12 Tahun	: 720 Jiwa
3	13- 16 Tahun	: 868 Jiwa
4	17- 59 Tahun	: 3.694 Jiwa
5	>60 Tahun	: 508 Jiwa

Tabel diatas menjelaskan bahwa usia masyarakat Desa Kota Pari mulai dari balita hingga lansia. Jumlah yang paling banyak adalah masyarakat yang berumur 17-59 Tahun dan yang paling sedikit adalah masyarakat yang berumur 0-05 Tahun.

Tabel 11: Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan berdasar Lulus Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Pascasarjana	0 jiwa
2	Sarjana/ Diploma	54 jiwa
3	SLTA/ Sederajat	1334 jiwa
4	SLPT/ Sederajat	1529 jiwa
5	SD/ Sederajat	2629 jiwa
6	Tidak tamat SD/ tidak sekolah	567 jiwa

Tabel diatas menjelaskan tentang jumlah penduduk yang berpendidikan dan tidak yang berpendidikan dengan jumlah 0 jiwa pada Pendidikan Pascaarjana dan terdapat 2629 jiwa yang hanya berpendidikan SD Sederajat.

Berdasarkan data komposisi penduduk menurut jenis kelamin, ternyata penduduk perempuan lebih banyak dari pada penduduk laki-laki. Keadaan ini merupakan akibat dari banyaknya penduduk laki-laki usia muda (usia produktif) yang merantau atau bermigrasi kedaerah lain. Pada umumnya mereka memilih daerah tujuan ke kota, seperti Kota Medan, Pekanbaru, dan daerah lainnya. Perkawinan

pada usia muda (17-19 tahun) masih sering terjadi di desa ini, sehingga kepadatan penduduk mulai meningkat.

6. Landasan Hukum Desa Kota Pari

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional.
- b. UU No. 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara.
- c. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- d. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- e. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- f. PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Pertimbangan.
- g. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- h. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- i. PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- j. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah.
- k. PP No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Desa.
- l. Permendagri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan pembangunan Desa.
- m. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- n. Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa.
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No. 7 Tahun 2006 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No. 33 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah.
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No. 8 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan Desa.

- t. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No. 10 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Perolehan Pajak dan Retribusi Daerah.
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No. 11 Tahun 2009 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No. 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai TA 2014.
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No. 6 Tahun 2014 tentang pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2014.

7. Kondisi Ekonomi Desa Kota Pari

Jika pengukuran tingkat kesejahteraan ekonomi didasarkan dari kemampuan daya beli dan pemenuhan kebutuhan primer, memang penduduk Desa Kota Pari bisa dikatakan cukup sejahtera. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, ternyata kurang didukung dengan aktifitas ekonomi secara riil.

Usaha-usaha untuk mengarahkan permodalan dari luar, terutama untuk membangun usaha-usaha produktif pedesaan, kiranya sangat perlu untuk dilakukan.

Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani. Hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani. Dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan

akhirnya tidak punya pilihan lain selain terpaksa menjadi petani, buruh tani atau buruh pabrik.

Keadaan ini pula yang sekarang ini juga menjadikan semakin sulitnya mencetak kader-kader petani muda. Penyaluran tenaga-tenaga produktif desa, yang dahulunya bisa menyuplai kebutuhan tenaga kerja dibidang pertanian mulai mengalami pergeseran. Semakin sedikit tenaga muda desa yang mau berkecimpung di sektor-sektor yang dekat dengan pertanian.

Sungguh sebuah ironi, pada saat lapangan pekerjaan lain mengalami *over loaded* tenaga kerja, sektor pertanian justru sulit untuk mendapatkan tenaga kerja. Di Desa Kota Pari sendiri, kebutuhan akan tenaga kerja mulai mengandalkan tenaga dari daerah luar. Kedepan, ini menjadi potensi dan masalah yang perlu dipikirkan, agar sektor pertanian menjadi sektor yang lebih menarik. Pada umumnya masyarakat di Desa Kota Pari mayoritas berprofesi sebagai Petani.

Secara keseluruhan, keadaan ekonomi penduduk Desa Kota Pari, dapat digambarkan pada Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian sebagai berikut:

Tabel 12: jumlah penduduk menurut mata pencaharian

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	1.250 Jiwa
2	Karyawan	10 Jiwa
3	Wiraswasta	686 jiwa
4	Pegawai Negeri Sipil	17 jiwa

5	Buruh	12 Jiwa
6	TNI/ POLRI	6 jiwa
7	Nelayan	127 Jiwa
8	Jasa	4 jiwa

Tabel diatas menjelaskan berbagai profesi atau pekerjaan masyarakat di Desa Kota Pari bahwa jumlah petani lebih banyak dengan perbandingan 1.250 Jiwa, dibanding pekerja Jasa yang hanya 4 jiwa.

kondisi masyarakat tergolong cukup baik, terutama setelah adanya Polindes dan Bidan Desa, keselamatan ibu melahirkan meningkat, keberadaan balita kurang gizi sudah mulai berkurang. Selaras dengan semakin baiknya perekonomian masyarakat Desa Kota Pari.

8. Sarana dan Prasarana Desa Kota Pari

Desa Kota Pari ini telah terhubung dengan daerah lain jalan desa-desa perbatasan. Keadaan jalan desa secara umum cukup baik, namun musim hujan tiba di beberapa tempat mengalami kerusakan jalan dan tergenang air. Di Desa Kota Pari jalan desa kurang lebih 15km. Aspal 9km, sirtu 6km. Sarana transportasi yang paling banyak digunakan warga masyarakat adalah sepeda, sepeda motor dan becak. Di desa ini belum ada sarana transportasi umum, seperti Bus, Mikrolet atau sejenisnya.

Sarana dan prasarana Desa Kota Pari terdiri dari Tempat Ibadah yaitu, Masjid 6 (enam) buah. Musholla 10(sepuluh) buah, dan Gereja 0(nol) buah. Sarana

pendidikan, TK/ Paud 5 Buah, Sekolah Dasar 3 Buah, Madrasah 0 Buah, SLTP 1 Buah, SLTA2 Buah. Sarana Kesehatan Puskesmas Pembantu 1 Buah. Sarana dan Praasarana Pemerintah Kantor Desa Buah

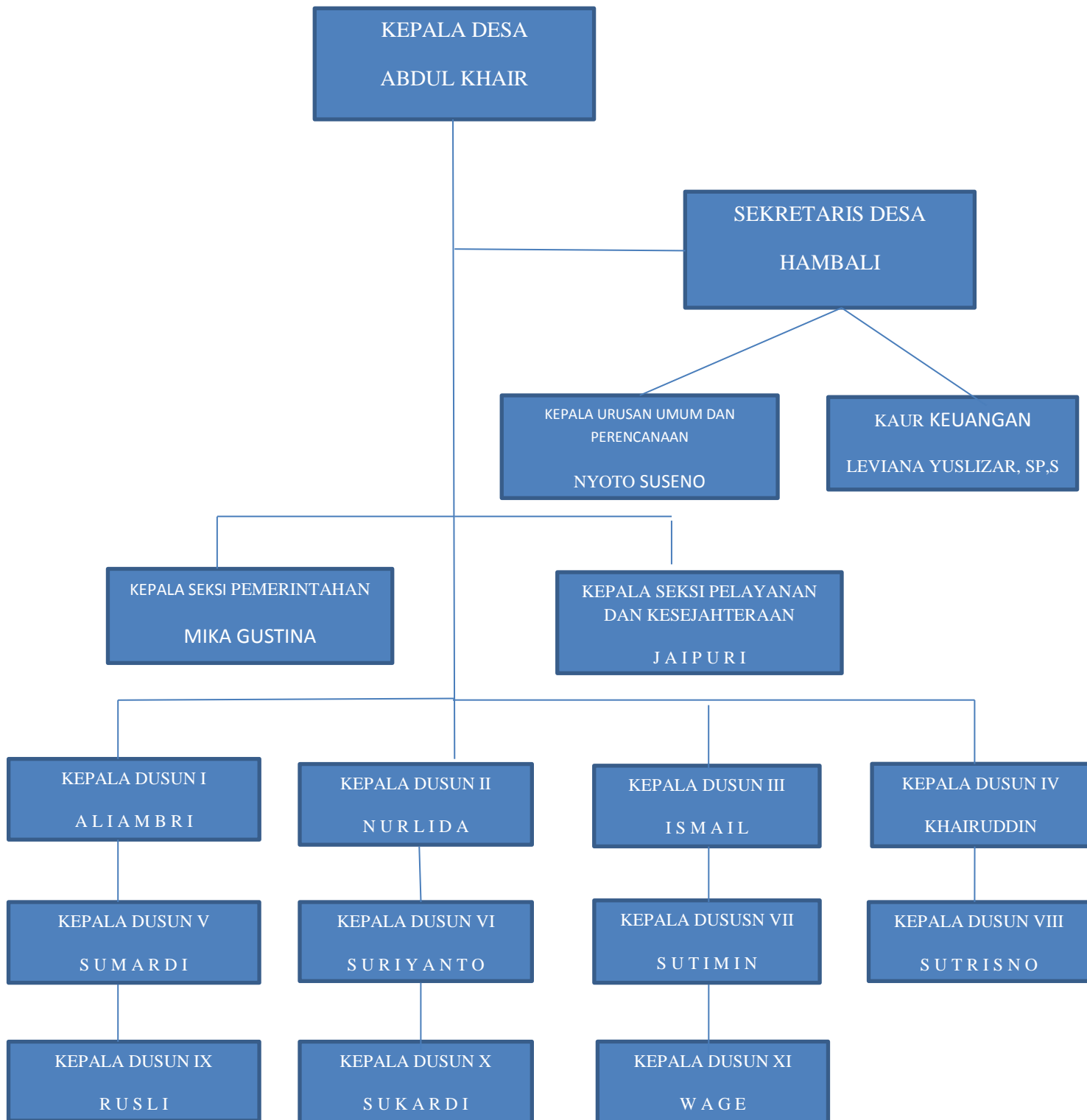
Jaringan Listrik dari PLN sudah tersedia di desa ini, sehingga hampir semua rumah tangga menggunakan tenaga listrik untuk memenuhi keperluan penerangan dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Ibu-ibu rumah tangga juga menggunakan kompor gas 3 kg untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dan di desa ini air bersih dapat diperoleh dari sumur gali dan juga yang menggunakan sumur bor.

9. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kota Pari

Struktur Pemerintah di Desa Kota Pari bisa dikatakan cukup lengkap. Lembaga- lembaga yang umum ada tingkat desa, berjalan dengan baik. Administrasi desa juga mengalami peningkatan dan telah terkomputerisasi dengan baik. Adapun susunan pemerintahan dan Lembaga Desa Kota Pari sebagai berikut:

- a. Kepala Desa : Abdul Khair
- b. Sekretaris Desa : Hambali
- c. Kepala Urusan Pemerintahan : Mika Agustina
- d. Kepala Urusan Pembangunan : Jaipuri
- e. Kepala Urusan Umum : Nyoto Suseno
- f. Kepala Dusun terdiri dari 11 (sebelas) Kepala Dusun

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kota Pari dapat dilihat pada bagan barikut ini



B. Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Ekonomi di Desa Kota Pari

1. Arah dan Kebijakan Pembangunan Desa Kota Pari

Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif yaitu melibatkan semua unsur masyarakat desa yang terdiri dari ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, ketua organisasi kemasyarakatan, ketua organisasi perempuan, LSM, dan lain sebagainya. Perencanaan pembangunan desa terdiri dari:²⁴

- a. Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) adalah dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun yang memuat arah dan kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program, program perangkat desa, program prioritas kewilayahan disertai rencana kerja.
- b. Rencana kerja pembangunan desa (PKP Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintahan daerah dan PRJM Desa dan

²⁴Aguswan dan Nurfeni, *Model Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa*, (Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya, 2018), hlm. 12.

ditetapkan dalam keputusan desa dengan berpedoman pada peraturan Daerah.

Kebijakan pembangunan Desa Kota Pari diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pokok sandang, pangan dan papan menuju terciptanya masyarakat yang sejahtera lahir batin, mandiri dan bermartabat. Untuk mencapai itu semua, maka pembangunan di Desa Kota Pari dititik beratkan pada bidang pertanian dan peternakan, melalui usaha perbaikan hasil dan kualitas produk pertanian dan peternakan sebab lebih dari 75% penduduk Desa Kota Pari hidup sebagai petani dan peternak yang menjanjikan untuk dikembangkan di Desa Kota Pari. Pada kondisi seperti ini, tentunya perlu juga dibarengi dengan pembangunan pada semua aspek kehidupan, sehingga diharapkan dapat saling mendukung, saling melengkapi dan saling mengabdikan pada masa depan Desa Kota Pari.

Strategi pembangunan Desa Kota Pari menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan Desa Kota Pari, prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman serta kerangka berpikir yang melatar belakangi upaya Visi dan Misi yang akan dilakukan. Berdasarkan strategi tersebut selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah kebijakan keuangan Desa Kota Pari, kebijakan umum dan program pembangunan yang dilakukan setiap ruas jalan Desa Kota Pari demi memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kemudahan dalam menggunakan akses jalanan bagi masyarakat Desa Kota Pari.²⁵

²⁵Wawancara dengan Bapak Abdul Khair selaku Kepala Desa Kota Pari, pada tanggal 17 Juli 2020.

Tabel 13. Strategi dan Arah Kebijakan Desa Kota Pari

NO	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Penguatan Kapasitas Desa dalam tata kelola pemerintah Desa yang lebih baik dan kemandirian.	Mengembangkan kemampuan Aparatur Pemerintah Desa dalam mengelola Pemerintah Desa.
2	Pemberdayaan satuan lembaga-lembaga kemasyarakatan agar lebih berfungsi dalam pengelolaan pembangunan Desa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa 2. Mengembangkan hubungan kemitraan Pemerintah Desa, BPD, LKMD dan Warga.
3	Peningkatan jumlah dan kualitas sarana prasarana perekonomian Desa Kota Pari.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk dan mengembangkan Badan Usaha Desa (BUMDES) 2. Meningkatkan Produktifitas lahan pertanian
4	Peningkatan Partisipasi/kesadaran masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
5	Meningkatkan kualitas penataan lingkungan yang Lestari terjaga, Terpelihara dan berkelanjutan.	Mengatur ketertiban dalam pemanfaatan lahan dan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Tabel diatas menjelaskan tentang arah dan kebijakan Pemerintah Desa Kota Pari yang berisikan 5 kebijakan yang terlaksana di Desa Kota Pari.

2. Arah dan Kebijakan Keuangan Desa Kota Pari

Arah dan kebijakan keuangan desa adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja desa secara efektif dan efisien.

Kebijakan dalam pengelolaan keuangan Desa Kota Pari adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sistem pemerintahan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya serta mendorong peningkatan pembangunan partisipatif melalui swadaya gotong-royong masyarakat. Pengelolaan keuangan desa harus benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi dengan melibatkan segenap unsur masyarakat desa yang dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum, yang mana pengelolaan keuangan desa harus menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali sebagaimana yang telah direncanakan, dan apabila terjadi hal-hal yang berkaitan dengan penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan, maka penyelesaiannya secara musyawarah untuk mufakat antara pemerintah desa dengan masyarakat desa.

Kebijakan-keijakan pengelolaan keuangan desa menganut pada beberapa peraturan pemerintah yang telah ditetapkan yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan

Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2007 tentang APBDes.

Secara garis besar arah kebijakan pembangunan desa meliputi:

a. Arah kebijakan pendapatan desa :

- 1). Pendapatan asli desa yang terdiri dari:
 - (a) Hasil pengutipan retribusi pemakai air (P3A)
 - (b) Hasil pembuatan surat menyurat
- 2) Bagi hasil pajak daerah kabupaten
- 3) Bagian dana perimbangan keuangan daerah yaitu Alokasi Dana Desa (ADD)
- 4) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat.

b. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa :

Kebijakan umum pengelolaan pendapatan desa adalah meningkatkan efektifitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan desa melalui:

- 1) Identifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan desa dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah.
- 2) Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset yang potensial

- 4) Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak
- 5) Peningkatan sosialisasi tentang pajak kepada masyarakat
- 6) Pembangunan infrastruktur pendukung peningkatan pendapatan desa.
- 7) Penyusunan dan perubahan peraturan tentang pendapatan desa.

c. Arah kebijakan Belanja Desa :

1) Jenis belanja desa langsung

- a) Belanja program sarana dan prasarana
- b) Belanja program sosial budaya
- c) Belanja bidang Ekonommi

2). Jenis belanja desa tidak langsung

- a) Belanja Pegawai
- b) Belanja hibah
- c) Belanja Bantuan Sosial
- d) Belanja tak Terduga

d. Kebijakan pengelolaan belanja desa

Kebijakan dan proyeksi belanja desa adalah kebijakan menangani pengalokasian belanja pada bidang, fungsi dan sektor dalam jangka waktu lima tahun. Berdasarkan masalah yang dihadapi desa serta program prioritas pembangunan tahun 2014-2019 maka arah kebijakan belanja desa adalah sebagai berikut:

- 1). Efisiensi anggaran pada belanja tidak langsung
- 2). Memperbesar alokasi belanja langsung dan belanja bantuan sosial dalam mempercepat pengurangan kemiskinan.

Kegiatan yang dibiaya :

1) APBD/ APBN Meliputi: APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN

apabila kegiatan meliputi :

- a) Bukan kewenangan desa
 - b) Biayanya terlalu besar/ tidak mampu dibiayai desa
 - c) Desa tidak mempunyai kapasitas teknis untuk melaksanakannya.
- 2) APBDesa
- a) Kewenangan desa
 - b) Biayanya terjangkau oleh anggaran desa
 - c) Desa mempunyai kapasitas teknis untuk melaksanakannya
- 3) Lainnya

Berasal dari sumber yang diatas, misalnya :

- a) Bantuan dari organisasi non pemerintah.
- b) Bantuan program PNPM-MP, dan lain-lain.
- c) Pihak ketiga lainnya: perusahaan, dan lain-lain

C. Pengelolaan Pendapatan Desa Kota Pari

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Desa Kota Pari dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan desa dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Untuk lebih mengintensifikasikan desa, tentunya harus ditunjang dengan berbagai aspek sehingga pendapatan desa dapat dimanfaatkan, adapun aspek tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun rancangan kebutuhan sesuai skala prioritas dan disesuaikan dengan pendapatan desa.
- 2) Mendahulukan kepentingan yang sangat mendesak
- 3) Melakukan evaluasi terhadap pendapatan yang telah dibelanjakan.

Desa Kota Pari dalam mengelola pendapatan tidak hanya mengintensifikan pendapatan tetapi perlu juga melakukan ekstensifikasi pendapatan guna menunjang dan meminimalisasi kekurangan/ defisit anggaran yaitu dengan:

- a. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga
- b. Meningkatkan budaya gotong-royong guna mengurangi beban pemerintah dalam melaksanakan program bagi masyarakat.
- c. Membuat permohonan bantuan kepada pemerintah guna meningkatkan pembangunan baik fisik maupun non fisik.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Pendapatan Desa Kota Pari sebagai Berikut :

- a) Pendapatan Asli Desa
 - 1) Hasil Usaha Desa
 - 2) Hasil Kekayaan Desa
 - 3) Pungutan Desa
 - 4) Hasil Swadaya dan Partisipasi
 - 5) Hasil Gotong Royong
 - 6) Lain-lain pendapatan asli desa yang sah

- b). Alokasi Dana Desa
 - c). Bagi Hasil Pajak/ Retribusi Kabupaten
 - d). Bantuan Pemerintah Kabupaten
 - 1). TPPAPD Kepala Desa
 - 2). TPPAPD Kepala Urusan
 - 3). TPPAPD Kepala Dusun
 - e). Sumbangan Pihak Ketiga
3. Permasalahan dan Penyelesaian

Permasalahan dalam pengelolaan Pendapatan desa:

- a) Pembangunan masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal, hal ini dikarenakan desa belum dapat memaksimalkan/ tidak dapat memperoleh pendapatan asli desa dan masih bergantung terhadap bantuan dari pemerintah Daerah melalui ADD dan Pemerintah Pusat Melalui PNPM-MP
- b) Sumber Daya Manusia/ masyarakat belum dapat memberikan kontribusi yang besar dalam pendapatan asli desa.

Upaya penyelesaian masalah dalam pengelolaan pendapatan desa:

- a). Pembangunan yang mendatang sangat diharapkan, selain bantuan dari Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Pusat, desa juga mampu melaksanakan pembangunan secara gotong royong ataupun swadaya sehingga pembangunan dapat terus berjalan di Desa Kota Pari.

b). Sangat diharapkan kepada warga masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam penyumbangan pendapatan asli desa, sehingga dapat meningkatkan pembangunan desa menjadi lebih baik, serta mengawasi segala bentuk kegiatan pemerintahan desa, sehingga terbentuk pemerintahan yang demokratis, transparan, bertanggungjawab dan peduli.

D. Pengelolaan Belanja Desa Kota Pari

1. Kebijakan Umum Keuangan Desa

Segala kebijakan keuangan desa berdasarkan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2014, Peraturan Desa Ara Payung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014, sehingga pengelolaan keuangan desa dapat terlaksana dengan baik.

2. Target dan Realisasi Belanja

Dalam pengelolaan Belanja Desa, Desa Kota Pari mempunyai target dan Realisasi belanja sehingga tercipta transparansi antara pemerintahan desa dan masyarakat.

3. Permasalahan dan Penyelesaian

Permasalahan yang ada dalam pengelolaan belanja desa :

- a. Anggaran belanja Desa Kota Pari belum menyentuh kepada masyarakat secara luas
- b. Anggaran belanja yang didapat Desa Kota Pari di gunakan secara bertahap dan bergulir sehingga bisa dirasakan masyarakat secara luas dengan cara memprioritaskan kebutuhan yang mendesak.

E. Indikator Kerja Pemerintahan Desa

Strategi pembangunan Desa merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan desa. Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan diperlukan pencapaian berikut :

- a. Pembangunan desa yang berkeimbangan dan berkelanjutan

Pembangunan daerah yang berkeimbangan diarahkan untuk melanjutkan program pembangunan yang telah dicanangkan dan dilaksanakan pada masa-masa sebelumnya. Program-program pembangunan yang sudah dilaksanakan akan dilanjutkan dengan modifikasi sesuai dengan kemajuan jaman dan tuntutan masyarakat. Pembangunan desa yang berkelanjutan diarahkan agar pembangunan desa mempertimbangkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Langkah-langkah membangun harus bermanfaat bagi generasi sekarang dan bagi keberlanjutan pembangunan generasi-generasi berikutnya. Kondisi lingkungan dan

sumber daya alam harus dikelola agar pembangunan dapat memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi.

b. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Desa Kota Pari

Diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Kota Pari dalam segala aspek terutama yang berhubungan dengan pemenuhan dasar yaitu kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Hak-hak dasar tidak berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi pemenuhan hak lainnya.

c. Percepatan Pembangunan desa dengan mengembangkan ekonomi lokal

Yaitu dengan mengembangkan kapasitas dan kegiatan ekonomi masyarakat didesa untuk meningkatkan derajat kemajuan ekonomi daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, diharapkan tepat dan mampu menemukan dan menggali potensi ekonomi produktif yang berdaya saing sekaligus berbasis sumber daya lokal baik melalui pemerintah daerah, sektor swasta dan kelembagaan yang berbasis masyarakat setempat.

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Pari

Diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan sosial, budaya dan ekonomi, melalui pemberdayaan ini masyarakat diarahkan untuk mengoptimalkan kemampuan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki. Komitmen untuk

pemberdayaan masyarakat ini akan didukung sepenuhnya oleh alokasi anggaran pembangunan yang berpihak pada masyarakat dengan strategi anggaran untuk rakyat untuk menuju sejahtera. Tujuan pemberdayaan masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat terhadap berbagai inovasi pertanian atau perkebunan, peternakan, dan keterampilan yang dapat diterapkan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian, pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat sesuai harapan maka alokasi dana dalam APBDes sebagai implementasi dari program-program pembangunan tersebut harus diwujudkan secara nyata.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa peran pemerintah dalam meningkatkan ekonomi di Desa Kota Pari yaitu:

1. Faktor utama yang berpengaruh dalam peningkatan ekonomi yaitu pembentukan organisasi yang melibatkan semua unsur masyarakat dan perencanaan pembangunan lima tahun kedepan. Pembangunan desa diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pokok sandang, pangan, dan papan. Pembangunan desa yang dilakukan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan desa menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan keuangan Desa Kota Pari, kebijakan umum dan program pembangunan yang dilakukan setiap ruas jalan guna memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kemudahan dalam menggunakan akses jalan bagi masyarakat desa. Selain itu, faktor utama yang dilakukan Pemerintah Desa yaitu meningkatkan produktifitas lahan pertanian, kualitas pelayanan pendidikan dan kualitas pelayanan kesehatan Desa Kota Pari.
2. Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Kota Pari yaitu membangun tata Pemerintahan Desa yang lebih terbuka kepada masyarakat, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam, dengan itu Desa Kota Pari akan mencapai tujuannya dan memperoleh ekonomi yang lebih

baik lagi. Selain itu, mengembangkan kapasitas masyarakat dengan melakukan pelatihan-pelatihan sehingga masyarakat desa mampu membuka usaha mikro yang memperoleh keuntungan dan mengubah taraf hidup menjadi lebih baik lagi.

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis mendapatkan konstruksi pemahaman bahwa masing-masing program memiliki keterkaitan yang saling mendukung dalam upaya meningkatkan status desa menuju desa mandiri yang dilandasi indeks desa membangun.

B. SARAN

Sesuai dengan kesimpulan tersebut, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk menetapkan kemandirian desa dari visi dan misi Pemerintahan Desa harus mengevaluasi dan mengukur pencapaian dari visi dengan membuat alternatif sasaran yang baru agar masing-masing indeks tersentuh secara profesional.
2. Pemerintah Desa bersama lembaga-lembaga yang ada di desa harus menjalankan program yang belum berjalan maksimal, seperti pemberdayaan masyarakat, pendampingan kelompok usaha, dan peningkatan ekonomi masyarakat serta menjamin pelayanan kebutuhan dasar secara maksimal dan berkelanjutan.
3. Pemerintah dan lembaga desa lainnya harus terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

dalam porses Pemerintahan Desa serta budaya gotong-royong di masyarakat.

4. Pemerintah Desa dan BPD Desa Kota Pari harus terus mengawasi kinerja aparatur lembaga yang ada di Desa Kota Pari agar kemampuan mengelola lembaga dapat selaras dengan program yang ingin dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, Rendy, dkk. 2018. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Arifin, Imamul. 2001. *Membuka Cakrawala Ekonomi*, Jakarta: PI Setia Purna Invers.
- Hermawan, Asep. 2005. *penelitian Bisnis paradigma kuantitatif*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Ibrahim, 2018. *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kawasan Tambang Emas*, Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Ivanicuch. 2014. *Indeks Kemandirian Desa*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Latif, Adam, dkk. 2019. *Kepemimpinan Pemerintahan Desa, Partisipatif Masyarakat dan Perencanaan Pembangunan*, Pasuran, Jawa Timur: CV.PENERBIT QIARA MEDIA.
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah : Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Negara*, Jakarta: KENCANA.
- Manzialati, Asfi. 2017. *metodologi penelitian kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*, Malang: UB Press.
- Maryanti Kun dan juju suryawati. 2001. *Sosiologi*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Maryunani. 2020. *Ekonomi Perdesaan*, Malang: UB Press.

- Nurfeni dan Aguswan. 2018. *Model Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa*, Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya.
- Pahlevi, Andreas Syah. 2018. *Kolase Pemikiran Ekonomi Kreatif Nasional*, Semarang: CV. Oxy Consultant.
- Prayitno, Gunawan. 2018. *Membangun Desa “Merencanakan Desa dengan Pendekatan Partisipatif dan Berkelanjutan*, Malang: Tim Ub Press.
- Putang, Iskandar. 2015. *Pengantar Ekonomi Makro : Pengantar Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Makro*, Bogor: Mitra Wacana Media.
- Rivai, Andi Kardian. 2016. *Komunikasi Sosial Pembangunan: Tinjauan Teori Komunikasi dalam Pembangunan Sosial*, Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Rukin. 2019. *Pembangunan Perekonomian Masyarakat Desa Mandiri*, Sidoarjo : Zifatma Jawa.
- Sabon, Boli. 2019. *Ilmu Negara: Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Universitas Atma Jaya.
- Setiawan johan & Albi Anggito. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sulaaiman, Abdul Rahman, dkk. 2020. *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020.

Wardiah, Ernawati. 2017. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bmedia.

Wawan, sarwono Sarlito. 2015. *Teori-teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers.

Wardianto, Bintari. 2016. *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*,
Surabaya: Airlangga University Press.

Wawancara dengan Bapak Abdul Khair selaku Kepala Desa Kota Pari, pada tanggal
17 Juli 2020.

Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi 2017) Fakultas
Dakwah dan Komunikasi UIN SU Medan 2017. *Pedoman Penulisan Skripsi*,
Medan: Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Utoyo. 2007. *Geografi Membuka Cakrawala Dunia*, Bandung: PT Setia Purma Invres.

Putang, Iskandar. 2015. *Pengantar Ekonomi Makro: Pengantar Dasar-dasar Ilmu
Ekonomi Makro*, Bogor: Mitra Wacana Media.

<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/6TAHUN2014UU.HTM>. Diakses
Tanggal 12 Maret Pukul 07: 25 Wib

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B-1309/DK/DK.V.1/TL.00/7/2020

11 Juli 2020

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

Yth. Bapak/Ibu Kepala Kantor Kepdes Desa Kota Pari

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Junianti Lubis
NIM : 0103163040
Tempat/Tanggal Lahir : Sei Kepayang Tengah, 25 Juni 1997
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. perdamaian Ds.VIII Kec.Sei Kepayang Tengah
Kab.Asahan Kecamatan Sei Kepayang

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Kantor Kepdes Desa Kota Pari, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi yang berjudul:

Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan Ekonomi di Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 11 Juli 2020
DEKAN



Digitally Signed

Dr. Soiman, MA
NIP. 196605071994031005

Tembusan:

- Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
KECAMATAN PANTAI CERMIN
DESA KOTA PARI

KODE POS 20987

Nomor : 18.38.5 / 470 / 739 / VII / 2020
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : **Balasan**

Kota Pari, 17 Juli 2020
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi
Di -
Medan

Berdasarkan dengan surat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Dakwah dan Komunikasi Nomor : B-1309/DK/DK.V.1/TL.00/7/2020 tanggal 16 Juli 2020 Perihal Izin Riset.

Maka berkenaan dengan hal tersebut diatas pada dasarnya kami tidak merasa keberatan dan memberikan izin kepada seorang mahasiswa yang bernama :

Nama : Junianti Lubis
NIM : 0103163040
T/Tgl Lahir : Sei KEpayang Tengah, 25 Juni 1997
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Perdamaian Ds VIII Kec Sei Keparang Tengah Kab. Asahan

Untuk melaksanakan riset dalam rangka menyusun skripsi (Karya Ilmiah) di Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kab Serdang Bedagai yang berjudul "**Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi di Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai**" dari tanggal 17 Juli 2020 s/d 17 Agustus 2020.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Desa Kota Pari

ABDUL KHAIR



Foto dengan Perangkat Desa Kota Pari





Dokumentasi kegiatan Gotong Royong